

Strategi Tiongkok dalam Mendominasi Hubungan Kerjasama Ekonomi dengan Zimbabwe (2000-2015)

Wiwit Tri Rahayu

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email : wiwitalfyan@gmail.com

Abstract

This research tries to analyze the strategies on China's domination over bilateral cooperation with Zimbabwe, particularly in economic sector. Data from various sources show that Zimbabwe is a vulnerable country both economically and politically. Zimbabwe posses bad politic and economic regime thus high risk for any cooperation or investation purposes. The analysis of China's domination can be explained by the fact which China tend to be more influential than Zimbabwe on doing their economic cooperation. Zimbabwe government even tend to make China's enterprises interests go easier than local enterprises that harmful for its local enterprises development. Such favorable condition only can be achieved by China trough applying the right strategies based on Zimbabwe crises. China often provides Zimbabwe for support while other countries are sanctioning and embargoing. Beside, China also give Zimbabwe a lot of assistances for its development while International Monetary Fund (IMF) and World Bank are postponing their loans due to Zimbabwe's violation issues and hyperinflation until the government of Zimbabwe pay off all the debt. By using descriptive analysis through data, literature reviews, and theoretical framework this research found evidences that proved the hypothesis regarding China's strategies to dominate its bilateral economic cooperation with Zimbabwe, which are by implementing both (1) non-intervention and (2) foreign aid strategy.

Kata Kunci: *China's Strategy, Zimbabwe, Non-Intervention, Foreign Aids.*

Pendahuluan

Hubungan Tiongkok dengan Zimbabwe sejatinya telah terjalin sejak tahun 1970-an ketika terjadi perebutan atas kekuasaan dalam pemerintahan Zimbabwe pasca kemerdekaan yang diperoleh dari Britania Raya. Dukungan tersebut diberikan kepada Zimbabwe African National Union (ZANU) yang kemudian memenangkan perselisihan tuntut mengisi kursi pemerintahan. Terpilihnya pemimpin ZANU, Robert Mugabe menjadi presiden Zimbabwe turut menjadi awal kemudahan bagi Tiongkok untuk melakukan kerjasama dengan Zimbabwe (Edinger dan Burke,

2008: 2). Hubungan kerjasama antara keduanya kemudian semakin mengalami peningkatan dengan dibentuknya Forum for China-Africa Cooperation (FOCAC) pada tahun 2000. Sejak terjadinya FOCAC, pemerintah Tiongkok semakin banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada Zimbabwe yang dibalas dengan kemudahan akses perusahaan Tiongkok terhadap kekayaan alam yang dimiliki oleh Zimbabwe. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya FOCAC, yaitu upaya untuk melanjutkan reformasi ekonomi berupa penerapan atas *open door policy* (Chow, 2004: 128). Dibentuknya FOCAC pada tahun 2000 tidak lain adalah

upaya Tiongkok untuk melakukan *re-engagement* dengan negara-negara Afrika yang didasari oleh banyaknya kebutuhan Tiongkok atas bahan mentah yang berasal dari negara-negara Afrika, termasuk Zimbabwe.

Pada tahun 2001, hubungan Tiongkok dengan Zimbabwe juga turut mengalami peningkatan sebagai akibat dari masuknya Tiongkok ke dalam World Trade Organization (WTO). Sejak ketergabungannya, Tiongkok berusaha memenuhi aturan yang ada di WTO seperti penurunan tarif hingga 12% yang secara tidak langsung memudahkan ekspor-impor antara Tiongkok dengan Zimbabwe (Yang, 2003: 31). Tiongkok kemudian terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga dijuluki sebagai “pabrik dunia” pada tahun 2011. Menjadi produsen utama dunia tentu turut meningkatkan kebutuhan Tiongkok sebagai negara yang atas barang mentah untuk keperluan produksi. Terlebih untuk menjaga nilai kompetitif atas barang produksinya yang murah, Tiongkok perlu mengandalkan bahan mentah dari negara-negara Afrika seperti Zimbabwe. Negara-negara dunia ketiga juga berfungsi bagi Tiongkok untuk menjual barang-barang produksinya yang terkenal dengan kualitas sub-standar sehingga sulit untuk bisa masuk ke pasar-pasar di negara maju (Yang, 2003: 31).

Dalam hubungannya dengan Zimbabwe, Tiongkok berhasil menjadikan Zimbabwe sebagai negara untuk impor bahan mentah dan ekspor atas barang produksi jadi. Tiongkok berhasil menguasai beberapa perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan bahan mentah Tiongkok, seperti perusahaan di bidang agrikultur dan pertambangan. Tiongkok terbukti berhasil mendominasi atas bidang tersebut, dibuktikan pada tahun 2008 *Mineral Marketing Corporation of Zimbabwe* (MMCZ)

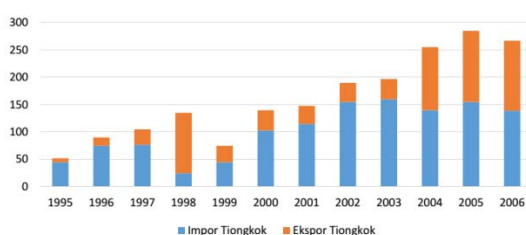
menandatangani nota kesepakatan dengan perusahaan nikel Tiongkok, Jinchuan Nickel Mining Company of China yang merupakan produsen nikel dan kobalt terbesar di Tiongkok yang memiliki kapasitas produksi tahunan mencapai 130.000 ton nikel, 200.000 tembaga dan 6.000 ton kobalt (Anon, 2009). Pada tahun 2012 perusahaan tembakau terbesar Tiongkok, Tian ze Tobacco juga berhasil menjadi pembeli utama atas tembakau di Zimbabwe dengan nilai mencapai 21% dari total ekspor panen Zimbabwe. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Tiongkok akan tembakau untuk menutupi tingginya permintaan atas konsumsi roko di negaranya (Mukwereza, t.t.: 4).

Selain banyaknya impor yang dilakukan atas bahan mentah, Tiongkok juga berhasil menjual barang-barang produksi ke pasar Zimbabwe. Barang-barang asal Tiongkok bahkan lebih diminati baik oleh penjual ataupun pembeli karena memiliki harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan barang produksi lokal (Zimstat, 2015). Kondisi tersebut merupakan beberapa bukti kecil dari adanya dominasi Tiongkok dalam melakukan kerjasama bilateral dengan Zimbabwe, khususnya di bidang ekonomi. Dominasi tersebut ditunjukkan dengan adanya posisi Tiongkok yang lebih dapat mempengaruhi Zimbabwe ketika melakukan kerjasama ekonomi. Terlebih dengan melihat kondisi Zimbabwe, keberhasilan Tiongkok untuk mampu bertahan melakukan kerjasama dengan Zimbabwe ditengah kecaman dari berbagai pihak mengindikasikan adanya penerapan strategi tertentu. Penerapan strategi kemudian dilakukan Tiongkok dengan menyesuaikan pada kondisi Zimbabwe yang sering mendapatkan kecaman dan kehilangan sumber bantuan dari dunia internasional.

Pembentukan Forum for China – Africa Cooperation (FOCAC)

Pembentukan FOCAC dinyatakan oleh Tiongkok sebagai bentuk *new strategic partnership* yang memfasilitasi konsultasi dan dialog antara Tiongkok dengan negara-negara Afrika, sehingga kerjasama antara keduanya dapat semakin komprehensif dilakukan (Meidan, 2004: 74). Forum ini digunakan oleh Tiongkok untuk menunjukkan kemampuannya dalam memberikan dukungan terhadap negara-negara Afrika seperti dukungan yang diberikan terhadap African Union (AU) dan New Partnership for African's Development (NEPAD) yang disampaikan saat deklarasi FOCAC tahun 2000 dan Addis Ababa Action Plan tahun 2003. Melalui FOCAC, Tiongkok berupaya untuk memetakan permasalahan yang ada di negara-negara Afrika kemudian menunjukkan kemampuannya untuk turut menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini dinilai oleh pengamat bahwa pembentukan FOCAC dengan model interaksi yang sedemikian rupa dimaksudkan Tiongkok untuk dapat lebih menjaga sumber bahan mentah yang ada di negara-negara Afrika dengan cara melahirkan kepercayaan di negara anggota, termasuk Zimbabwe. Data pada Grafik 1 menunjukkan bahwasannya kerjasama antara Tiongkok dan Zimbabwe cenderung mengalami kenaikan sejak terbentuknya FOCAC pada tahun 2000 (Edinger dan Burke, 2008: 16).

Grafik 1: Ekspor dan Impor Tiongkok terhadap Zimbabwe



(Sumber: World Trade Atlas dalam Edinger dan Burke, 2008: 16)

Melalui ketergabungan Zimbabwe dalam FOCAC, Tiongkok melihat bahwa kondisi Zimbabwe yang mengalami permasalahan baik dalam hal ekonomi ataupun politik memberikan peluang tersendiri bagi Tiongkok karena minimnya persaingan yang akan didapatkan dari negara-negara Barat dikarenakan banyaknya sanksi yang dijatuhkan atas kondisi internal Zimbabwe. Kondisi internal Zimbabwe sering mendapatkan kecaman dari pihak internasional karena rezim pemerintahan Mugabe dinilai otoriter dan sering melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) pada masyarakatnya. Kondisi ini menyebabkan perekonomian Zimbabwe terus mengalami penurunan hingga organisasi internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank memutuskan untuk menghentikan bantuan finansial kepada Zimbabwe (Thompson, 2012: 102). Pemanfaatan Tiongkok atas kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pesatnya peningkatan kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh Tiongkok kepada Zimbabwe sejak lahirnya FOCAC hingga kemudian mendorong pemerintah Zimbabwe untuk mengeluarkan *Look East Policy*, yaitu kebijakan yang mengindikasikan bahwa Zimbabwe akan mulai lebih bergantung pada negara-negara Asia seperti Tiongkok dibanding kan negara Barat (Mapaure, 2014: 16). Setelah pembentukan FOCAC dan lahirnya *Look East Policy*, hubungan antara Tiongkok dan Zimbabwe terus mengalami peningkatan. Tiongkok terus mendukung tindakan-tindakan Zimbabwe sekalipun hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma HAM ataupun tatanan internasional, seperti bantuan pada *Operation Murambatsina* dan pembangunan Sekolah Intelijen Mugabe (Edinger dan Burke, 2008: 18).

Lemahnya Perekonomian dan Pemerintahan Zimbabwe

Kondisi ekonomi dan politik Zimbabwe mulai mengalami penurunan drastis

pada akhir tahun 1990-an. Pengamat mengatakan bahwa perekonomian Zimbabwe bahkan mengalami titik pemulihan yang tidak pasti. Buruknya perekonomian ini tercermin dari adanya penurunan performa ekonomi negara lebih dari 40% hingga terjadi hiperinflasi antara tahun 2000 sampai 2009. Keadaan tersebut menuntut Zimbabwe untuk mulai menghapus mata uang negaranya karena dianggap sudah tidak memiliki nilai yang kompetitif dan mulai menggunakan sistem *multi-currency*. Zimbabwe kemudian memutuskan untuk menggunakan dolar Amerika Serikat dan rand Afrika Selatan ke dalam sistem *multi-currency* negaranya (Southern African-German Chamber of Commerce and Industry, 2016). Selain perihal ekonomi, kondisi Zimbabwe juga diperburuk dengan pemerintahan yang korup dan melekatnya budaya *sharing the wealth* di kalangan elitis. Kedua kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap iklim investasi yang buruk, salah satunya adalah minimnya pengembangan dalam hal infrastruktur (listrik, air dan transportasi) dikarenakan sulitnya mengalokasikan dana dalam keadaan krisis ditambah dengan regulasi yang tersentralisasi (Southern African-German Chamber of Commerce and Industry, 2016).

Fluktuasi dalam hal ekonomi dan politik Zimbabwe dimulai pada tahun 1997-an ketika pemerintah mengeluarkan *Economic Structural Adjustment Program* (ESAP), yaitu upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi pasar melalui keterbukaan terhadap ekspor-impor. Pada kenyataannya, sistem ini mengalami kegagalan dan justru membuat persaingan ketat antara produk lokal dan produk impor sehingga masyarakat merasa dirugikan dan mengeluarkan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah yang berujung pada terjadinya konflik dalam internal negara. Keadaan ini menuntut adanya pengeluaran besar dari pemerintah sebagai bentuk ganti rugi yang harus

diberikan kepada masyarakat untuk menghentikan konflik. Pengeluaran pemerintah akibat situasi ini tidaklah sedikit karena pemerintah harus membayar persenan sebanyak ZWD \$50.000 pada Desember 1997 serta uang bulanan sebanyak US\$ 2.000 pada Januari 1998 (Munangagwa, t.t.: 114). Pemerintah Zimbabwe kembali mengalami permasalahan internal akibat keterlibatannya dalam perang yang terjadi di Republik Demokratis Kongo (RDK) pada tahun 1998. Keterlibatan Zimbabwe berakhir pada banyaknya tentara dan bantuan yang diberikan pada perang di RDK hingga membuat Zimbabwe harus kembali mengeluarkan biaya yang besar dengan perkiraan mencapai US\$ 3 juta per hari serta total pengeluaran mencapai ZWD 6 milyar. Banyaknya pengeluaran tak terduga untuk pembiayaan tersebut menjadi awal mula penurunan performa Zimbabwe dalam ekonomi dan politik (Munangagwa, t.t.: 114).

Pada tahun 2000, Zimbabwe bahkan mendapatkan peringatan hingga sanksi dari pihak internasional karena dianggap melanggar ketentuan HAM dalam melakukan *Land Reform Policy*. Peringatan yang awalnya dikeluarkan oleh Human Right Watch berhasil membuat negara-negara lain khususnya negara-negara Barat dan organisasi internasional mulai melakukan embargo kerjasama dan bantuan terhadap Zimbabwe. Munculnya permasalahan ekonomi dan politik yang terjadi secara terus menerus berakibat pada masuknya Zimbabwe ke dalam kategori negara-negara dengan penghasilan rendah di Afrika ataupun di dunia dengan GDP hanya sebesar US\$ 13,66 milyar dan diperkirakan 70% dari total penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Selain kebijakan reformasi tanah yang dilakukan oleh Mugabe, semakin buruknya keadaan ekonomi dan politik juga disebabkan karena gagalnya rezim Mugabe dalam mengakhiri hubungan patronase dalam pemerintahan itu sendiri (Mashingaidze, 2016: 64). Kegagalan ini kemudian berimbas pada pemilihan presiden yang terkesan tidak

demokratis dan menyebabkan Zimbabwe mendapatkan sorotan negatif oleh pihak-pihak internasional hingga kembali mendapatkan embargo dan sanksi karena banyaknya kebijakan di Zimbabwe yang dianggap melanggar norma-norma tertentu. Embargo tersebut tentu berpengaruh terhadap perekonomian Zimbabwe yang menjadi semakin menurun, International IMF dan World Bank bahkan menghapuskan bantuannya hingga Zimbabwe mampu membayar hutang-hutangnya yang terdahulu dengan nilai lebih dari US\$ 10 milyar.

Zimbabwe mengalami hiperinflasi sebagai puncak dari penurunan ekonomi secara terus menerus akibat berbagai permasalahan yang ada. Hiperinflasi dapat terjadi ketika sistem ekonomi suatu negara mengalami guncangan baik secara eksternal ataupun internal. Dari kasus Zimbabwe dapat diketahui bahwa guncangan dalam sistem ekonomi muncul karena adanya pengeluaran tidak terduga yang cukup besar sebagai akibat dari pembiayaan perang. Pemerintah kemudian secara terpaksa akan meningkatkan jumlah cetakan uang untuk menutup defisit yang terjadi, yang di sisi lain turut menjadi penyebab atas inflasi. Pada Agustus 2006 inflasi tahunan Zimbabwe mencapai 1000% dan meningkat menjadi 1729.9% pada Februari 2007. Inflasi yang terjadi di Zimbabwe kemudian berakibat pada rendahnya permintaan uang dan memicu terjadinya dolarisasi (Munangagwa, t.t: 121). Sedangkan puncak dari hiperinflasi ini adalah pemberhentian pemakaian dolar Zimbabwe pada tahun 2009 karena nilai tukar yang sangat anjlok. Zimbabwe kemudian mulai menerapkan *multi-currency* dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat dan rand Afrika Selatan sebagai mata uang sehari-hari (Aliya, 2015). Hiperinflasi yang dialami Zimbabwe membuat beberapa pihak enggan untuk memberikan pinjaman ataupun bantuan luar negeri, termasuk di antaranya IMF dan World Bank. Hal ini menyebabkan Zimbabwe mulai bergantung pada

bantuan luar negeri dari negara-negara yang masih menjalin hubungan kerjasama dengannya, salah satunya adalah Tiongkok. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh negara seperti Tiongkok yang sudah mulai memberikan bantuan kepada Zimbabwe sejak awal kemerdekaannya (Thompson, 2012: 102).

Prinsip Non-Intervensi

Dengan melihat buruknya kondisi internal Zimbabwe ataupun hubungan Zimbabwe dengan negara-negara lain dan organisasi internasional, Tiongkok kemudian mencoba membangun kedekatan hubungan dengan Zimbabwe dengan membawa prinsip non-intervensi sebagai sebuah strategi. Menurut teori realisme, prinsip non-intervensi sebagaimana yang dibawa oleh Tiongkok dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk tidak campur tangan ataupun mengabaikan permasalahan yang ada pada rekan kerjasama, termasuk di bidang HAM seperti yang sering terjadi di Zimbabwe (Jackson dan Sorensen, 1999: 103). Dengan membawa asumsi anarki dari pandangan realisme, Tiongkok berupaya untuk menunjukkan posisi negara sebagai tempat kedaulatan tertinggi dan mengabaikan kedaulatan sistem internasional melalui dalih prinsip non-intervensi. Melalui prinsip ini, Tiongkok menganggap negara-negara Barat melakukan alibi dengan menuntut adanya demokratisasi dan penegakan HAM untuk mencapai kepentingan ekonomi dan hal tersebut dianggap Tiongkok sebagai pelanggaran atas hak-hak kedaulatan negara yang sudah merdeka (Thompson, 2012: 110). Tiongkok juga menggunakan prinsip non-intervensi sebagai bukti atas pernyataannya untuk tidak menggabungkan urusan bisnis dengan politik sehingga Tiongkok tidak memiliki hak apapun untuk ikut campur terhadap masalah internal suatu negara. Namun, penerapan atas prinsip non-intervensi oleh Tiongkok justru seringkali dinilai sebagai dukungan atas pelanggaran yang terjadi dan berlawanan dengan keputusan

organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Contohnya adalah sikap Tiongkok yang menolak untuk ikut campur dengan sanksi yang diberikan oleh PBB kepada Zimbabwe pada tahun 2008 terkait dengan pelanggaran dalam pemilihan presiden. Tiongkok menolak untuk menyetujui dengan alasan prinsip non-intervensi.

Menurut Mu Ren (2014: 103), cara paling mudah untuk menunjukkan non-intervensi Tiongkok adalah dengan melihat sikap Tiongkok terhadap sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh United Nation Security Council (UNSC). UNSC dapat digunakan sebagai alat untuk menguji prinsip non-intervensi Tiongkok karena UNSC menjadi forum universal untuk melakukan intervensi. Selain itu Tiongkok menjadi salah satu dari 5 anggota permanen yang memiliki hak veto untuk melakukan beberapa tindakan, termasuk membatalkan usul untuk melakukan intervensi (Ren, 2014: 103). Sebagai anggota UNSC, perilaku Tiongkok tergolong positif dan jarang mengeluarkan hak vetonya untuk menggagalkan sanksi yang diusulkan oleh UNSC. Di abad ke-21, Tiongkok mendukung 170 dari 182 sanksi yang telah dikeluarkan oleh UNSC dan *abstain* dari 8 sanksi sisanya (Tabel 1).

Years	Aye	Abstention	Veto
1990-1999	78	20	0
2000-2009	133	5	1
2010-2013.04	37	3	3

Tabel 1: Mosi Tiongkok terhadap Sanksi UNSC dalam *Post-War Era*

(Sumber: UN Security Council Sanctions Committees dalam Ren, 2014: 105)

Tabel 1 menunjukkan bahwasannya selama periode tahun 2000 hingga 2013 Tiongkok telah menggunakan hak vetonya sebanyak 4 kali. Sikap negatif berupa *abstain* dan veto yang diberikan oleh Tiongkok terhadap resolusi sanksi UNSC tersebut tidak terlepas dari sikap pembelaan terhadap negara-negara Afrika dan Timur Tengah, di antaranya adalah Sudan, Somalia dan Eritrea,

Libya, Suriah, dan tidak terkecuali Zimbabwe. Tiongkok menyatakan bahwa sikap *abstain* dan veto yang dikeluarkan merupakan bentuk aplikasi dari prinsip non-intervensi dan ekspresi netral dalam forum, namun sejatinya sikap tersebut justru menunjukkan keterpihakan dan kepentingan besar Tiongkok terhadap negara bersangkutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap setuju dari Tiongkok ketika sanksi dijatuhkan kepada negara-negara yang tidak lagi mewakili kepentingan Tiongkok seperti Côte d'Ivoire dan Sierra Leone (Ren, 2014: 106).

Di balik prinsip non-intervensi yang dibawa Tiongkok dalam veto yang dilakukan atas resolusi sanksi Zimbabwe, ada hal lain yang mendasari pertimbangan Tiongkok untuk mengeluarkan sikap. Tiongkok merupakan negara sumber impor senjata terbesar bagi Zimbabwe sejak adanya embargo yang dikeluarkan oleh negara-negara Barat. Dari sisi Tiongkok, terealisasinya sanksi tersebut tentu akan membuat Tiongkok harus mengurangi atau bahkan menghentikan penjualan senjatanya kepada Zimbabwe, dalam keadaan ini Tiongkok akan turut menjadi pihak yang dirugikan dan terkena dampak atas sanksi yang diberikan UNSC terhadap Zimbabwe (Shinn, 2013: 90). Keputusan Tiongkok untuk menolak resolusi tersebut tentu lebih disukai oleh pemerintah Zimbabwe karena sikap Tiongkok mengindikasikan adanya dukungan kepada pemerintah dan militer Zimbabwe.

Selain melakukan ekspor terhadap senjata, Tiongkok juga memiliki banyak komoditi produk jadi lain yang diekspor ke Zimbabwe. Tiongkok mampu menyediakan produk barang-barang kebutuhan yang lebih murah jika dibandingkan dengan barang hasil produksi lokal Zimbabwe. Banyak pasar-pasar di Zimbabwe yang lebih menyediakan produk Tiongkok daripada produk buatan perusahaan lokal. Meskipun banyak komplain yang terjadi karena rendahnya kualitas, namun

harga murah menjadi pertimbangan utama Zimbabwe untuk tetap melakukan impor (Shinn, 2013: 94). Barang-barang produksi Tiongkok kerap disebut dengan istilah “zhing-zhong” yang mengindikasikan kualitas rendah dan umumnya tidak dapat masuk ke pasar di negara-negara Barat. Dengan kualitas sub-standar, Tiongkok kemudian memutuskan untuk memasukkan barang-barangnya ke negara-negara berkembang seperti Zimbabwe. Komoditi ekspor Tiongkok ke Zimbabwe pun beragam mulai dari reparasi, elektronik, tekstil, dan sebagainya. Banyaknya komoditi ekspor Tiongkok ke Zimbabwe sekaligus menunjukkan berapa besar kerugian yang akan ditanggung oleh Tiongkok ketika embargo terhadap Zimbabwe berhasil dilakukan.

Pembelaan terhadap sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Zimbabwe dengan dalih prinsip non-intervensi bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Tiongkok. Tiongkok sering mendukung Zimbabwe, khususnya rezim Mugabe dibandingkan keputusan internasional. Dukungan semacam ini mulai diberikan Tiongkok sejak tahun 2000 ketika Zimbabwe dianggap melakukan pelanggaran HAM atas diadakannya *Land Reform Policy* yang dikeluarkan oleh rezim Mugabe. Pelanggaran ini menyebabkan Zimbabwe kehilangan bantuan dan embargo dari Amerika Serikat dan pembekuan aset dari Uni Eropa. IMF dan World Bank juga menghentikan bantuannya ke Zimbabwe. Namun Tiongkok justru menunjukkan dukungannya dengan menandatangani sebanyak 128 proyek dengan Zimbabwe (Lampton, 2014: 76). Tiongkok kembali menunjukkan sikap yang sama pada tahun 2005, ketika membantu Mugabe untuk melakukan *Operation Murambatsina*, yaitu pengusuran pemukiman di sekitar Harare yang menjadi ibu kota Zimbabwe. Operasi yang berhasil membuat lebih dari 700.000 rakyat Zimbabwe kehilangan tempat tinggal membuat rezim Mugabe mendapat teguran dari organisasi

internasional termasuk PBB. Adanya dukungan dari Tiongkok kemudian melahirkan spekulasi bahwa operasi tersebut dilakukan Zimbabwe untuk melindungi perusahaan-perusahaan Tiongkok dari persaingan lokal. Tiongkok juga melakukan kerjasama di bidang senjata dengan membangun Robert Mugabe School of Intelligence pada tahun 2007 di saat negara-negara Barat seperti Amerika Serikat sedang gencar melakukan embargo senjata kepada Zimbabwe atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Mugabe (Jacob dan Stultz, 2009: 3).

Dengan menerapkan strategi atas prinsip non-intervensi, Tiongkok berhasil menjaga hubungan kerjasama bilateralnya dengan Zimbabwe, khususnya di bidang ekonomi. Tiongkok berhasil menjaga pasokan bahan mentah dan juga pasar atas barang produksinya di Zimbabwe melalui pembelaan-pembelaan yang diberikan dengan dalih non-intervensi. Strategi ini terbukti lebih bisa dilakukan untuk mendominasi perekonomian Zimbabwe karena pemerintah Zimbabwe pun akhirnya lebih memilih untuk menjalin kerjasama dengan Tiongkok dibandingkan dengan negara-negara Barat lainnya. Keberhasilan strategi non-intervensi untuk mendominasi kerjasama ekonomi dengan Zimbabwe juga dibuktikan dengan mudahnya pemerintah Zimbabwe memberikan pengecualian terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok atas peraturan tertentu. Hal tersebut dilakukan Zimbabwe sebagai ucapan terima kasih atas konsistensi dukungan yang diberikan oleh Tiongkok (Tombindo dan Tukic, 2016: 16).

Strategi Bantuan Luar Negeri

Selain sebagai negara penerima bantuan sejak awal kemerdekaannya, Tiongkok juga berperan sebagai negara pendonor. Secara signifikan, Tiongkok mulai melakukan bantuan luar negeri sejak tahun 1950, kepada *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) dan Vietnam. Pada tahun 1955 setelah Konferensi

Asia-Afrika, Tiongkok memberikan bantuan yang awalnya hanya kepada negara-negara sosialis meluas kepada negara-negara berkembang seiring dengan terbukanya Tiongkok untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Bantuan yang diberikan Tiongkok pada periode ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pengakuan politik dan diplomatik pasca kemerdekaannya tahun 1949. Tujuan lainnya adalah untuk menyebarkan ideologi komunisme (Nowak, 2015: 202). Setelah mengalami konflik dengan Uni Soviet, bantuan luar negeri Tiongkok mulai digunakan untuk bersaing dengan Uni Soviet dalam mempengaruhi negara-negara yang baru merdeka. Pada periode tahun 1971, bantuan luar negeri difungsikan oleh Tiongkok guna mendapatkan dukungan untuk menjadi *legal representative* di PBB dan mendapatkan kursi permanen dalam UNSC. Strategi ini dapat dikatakan berhasil dengan melihat kembali bahwa sepertiga dukungan yang diperoleh Tiongkok berasal dari negara-negara Afrika yang mendapatkan bantuan dari Tiongkok. Sedangkan bantuan luar negeri yang dikeluarkan Tiongkok pasca 1979 memiliki tujuan yang lebih bersifat ekonomi (Nowak, 2015: 204).

Sebagai *emerging donor*, Tiongkok banyak dikecam karena memberikan bantuan tanpa adanya prekondisi tertentu dan merusak *rules of the game* dalam bantuan luar negeri demi memenuhi kebutuhannya. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok memiliki ciri yang berbeda jika dibandingkan dengan bantuan dari negara-negara Barat pada umumnya. Ciri tersebut meliputi bantuan berupa *self-development*, tidak mencampuri urusan politik, mengarah pada kerjasama mutualisme, fokus pada kebutuhan penerima, serta memberikan dukungan untuk melakukan inovasi. Sedangkan sumber dana untuk bantuan luar negeri adalah keuangan negara dan Export-Import Bank of China (EXIM Bank) yang bertanggungjawab terhadap pinjaman konsesional (Anon, 2011: 3).

Meskipun memiliki tujuan yang sama dengan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yaitu untuk mempromosikan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara miskin, namun pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok memiliki prinsip tersendiri. Tiongkok turut menerapkan prinsip non-intervensi dalam melakukan bantuan luar negerinya kepada negara-negara yang sedang mengalami sanksi dan embargo internasional, seperti yang dilakukan dengan Zimbabwe.

Sebagaimana prinsip non-intervensi, bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok kepada Zimbabwe sejatinya merupakan strategi yang diterapkan untuk memenuhi kebijakan luar negeri dan kepentingan Tiongkok di Zimbabwe. Sebagaimana yang dilakukan dalam FOCAC, Tiongkok akan berusaha untuk memetakan kebutuhan Zimbabwe dengan melihat kelemahan dan kekurangannya kemudian Tiongkok akan berusaha untuk menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dalam hal bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri menjadi penting bagi Zimbabwe karena Zimbabwe sudah tidak lagi menerima bantuan dari IMF, World Bank, ataupun negara-negara maju seperti Amerika Serikat (Lengauer, 2011: 10). Menurut pernyataan Palmer et. al. (2009: 10), sikap Tiongkok dapat dijelaskan dengan analisis tradisional dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Analisis tersebut menyatakan bahwa untuk dapat mewujudkan kebijakan luar negeri pada suatu negara, Tiongkok harus mampu melakukan *change* atau *maintenance* dalam kebijakan negara tersebut, salah satunya melalui bantuan luar negeri.

Hal ini terbukti dengan melihat kondisi bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok. Tiongkok menjadikan bantuan luar negeri sekaligus sebagai sarana untuk mengeksport barang ataupun jasa dari Tiongkok kepada negara penerima bantuan. Hal ini

dikarenakan Tiongkok menuntut 50% dari dana bantuan harus dihabiskan untuk membiayai kebutuhan atau material dari Tiongkok. Banyak pengamat yang kemudian menyatakan bahwa bantuan luar negeri dari Tiongkok sulit dibedakan dengan perjanjian investasi ataupun perdagangan (Condon, 2012: 7). Bantuan yang diberikan oleh Tiongkok juga berbeda dari definisi yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Development Assistance Committee (DAC) yang menyatakan bahwa bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang memerlukan hibah atau pinjaman yang diberikan melalui *government to government*. Sedangkan bantuan dari Tiongkok memiliki cakupan yang lebih luas dan dinilai lebih ambisius. Terlihat bahwasannya Tiongkok menganggap bantuan luar negeri yang diberikan sebagai kerjasama dalam bidang *foreign direct investment* (FDI) dan kontrak terhadap pemerintah dan perusahaan Tiongkok (Davies, et.al.: 2008: 13). Misalnya, EXIM Bank akan menyediakan *concessional loans* kepada negara berkembang dengan *interest rate* di bawah nilai pasar dengan syarat setidaknya 50% dari dana yang diberikan harus digunakan untuk produk-produk atau jasa Tiongkok, seperti untuk membeli bahan-bahan atau kerjasama dengan perusahaan konstruksi Tiongkok (Morrison, 2015: 4).

Bantuan luar negeri yang diberikan kepada negara otoriter dan mendapatkan sanksi internasional seperti Zimbabwe akan semakin memudahkan Tiongkok untuk mendapatkan akses dan mengalami sedikit persaingan dalam penguasaan sumber daya mentah yang dibutuhkan. Selain itu, perkembangan Tiongkok di bidang industri juga menuntut Tiongkok untuk memiliki konsumen atas barang-barang produksinya. Tiongkok yang terkenal dalam pengembangan teknologi, baik infrastruktur ataupun telekomunikasi, kembali memanfaatkan

bantuan luar negeri untuk mengenalkan produk-produknya. Banyaknya *state-owned enterprise* di Tiongkok membuat hubungan diplomatik, bantuan luar negeri, dan kepentingan ekonomi seolah membaur menjadi satu. Pada November 2004, perwakilan dari perusahaan Huawei bersama dengan wakil ketua Partai Komunis Tiongkok Wu Bangguo melakukan kunjungan ke Zimbabwe untuk menandatangani perjanjian dengan operator seluler milik pemerintah Zimbabwe. Perjanjian yang mencapai nilai US\$ 330 juta tersebut dilakukan oleh Tiongkok tidak lain untuk mengenalkan Huawei sebagai produk asli Tiongkok kepada Zimbabwe (Edinger dan Burke, 2008: 12). Keadaan ini menunjukkan bahwa bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok turut memiliki kaitan dengan upaya Tiongkok untuk mengeksport barang produksinya masuk ke dalam pasar negara penerima bantuan (Shinn, 2013: 94). Bukan menjadi hal yang sulit bagi Tiongkok untuk membuat barang produksinya lebih mendominasi di pasaran Zimbabwe karena kondisi perekonomian Zimbabwe yang buruk.

Kerjasama ekonomi antara Tiongkok dengan Zimbabwe terus mengalami peningkatan hingga 5000% pada tahun 2010. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Zimbabwe memberikan banyak kelonggaran terhadap masuknya investasi Tiongkok. Zimbabwe bahkan menjadi salah satu negara Afrika yang mewakili total FDI terbanyak dari Tiongkok dengan pertumbuhan US\$11.2 juta di tahun 2009 hingga mencapai US\$ 602 juta pada akhir 2014 (Alao, 2014). Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran bantuan luar negeri dan prinsip non-intervensi yang membuat Tiongkok secara konstan terus memberikan dukungan kepada Zimbabwe. Penjelasan di atas membuktikan bahwa bantuan luar negeri yang dilakukan Tiongkok tidak terlepas dari upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya. Melalui dominasi dalam melakukan kerjasama ekonomi dengan Zimbabwe, kepentingan Tiongkok dapat semakin

mudah terpenuhi. Di sisi lain, bantuan luar negeri juga diberikan Tiongkok untuk memperluas jangkauan penyebaran produk-produknya sebagai pendukung atas *go out strategy* yang dikeluarkan tahun 2002.

Keberhasilan Tiongkok dalam mendominasi kerjasama ekonomi dengan Zimbabwe juga dibuktikan melalui posisinya sebagai negara non-Afrika tujuan ekspor terbesar bagi Zimbabwe dan menjadi kreditor utama bagi Zimbabwe, mewakili 24% dari total kredit Zimbabwe (Zimstat, 2013). Sebagaimana strategi bantuan luar negeri, prinsip non-intervensi juga berhasil meningkatkan hubungan bilateral antara Tiongkok dengan Zimbabwe. Masih kuatnya budaya patronase dan korupsi yang ada di Zimbabwe turut berpengaruh dalam mewujudkan hal ini. Tiongkok juga berhasil menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya di bidang ekonomi sejak masuknya RMB ke dalam *multi-currency* di Zimbabwe. Tiongkok melihat adanya peluang bagi mata uang Tiongkok untuk masuk ke dalam *multicurrency* Zimbabwe, salah satunya dengan melakukan banyak pengeluaran RMB melalui FDI, ekspor-impor, dan pemberian hutang kepada Zimbabwe (Papadavid, 2016: 14). Keadaan tersebut akan membuat Zimbabwe tertarik untuk memakai mata uang Tiongkok untuk memudahkan banyaknya transaksi yang terjadi dengan Tiongkok. Kondisi demikian terbukti pada tahun 2014 ketika bank pusat Zimbabwe mulai memasukkan RMB ke dalam keranjang mata uang yang akan digunakan di Zimbabwe. Keinginan pemerintah Zimbabwe untuk memasukkan mata uang Tiongkok ke dalam *multi-currency* di negaranya sejatinya sudah ada sejak tahun 2010 namun baru berhasil terealisasi pada akhir 2015 (Chun, 2014: 20). Pada tanggal 22 Desember 2015, Mugabe secara resmi menyatakan penggunaan RMB setelah Tiongkok melakukan penghapusan hutang sebesar US\$ 40 juta. Hal ini tentu menguntungkan bagi Tiongkok karena penggunaan RMB

oleh Zimbabwe akan membantu peredaran mata uang Tiongkok yang kemudian akan dijadikan pertimbangan oleh IMF untuk menjadikan RMB sebagai mata uang global. RMB kemudian berhasil masuk ke dalam *Special Drawing Right* (SDR) IMF pada 1 Oktober 2016 (International Monetary Fund, 2016).

Masuknya RMB ke dalam *multi-currency* Zimbabwe secara tidak langsung turut membuat posisi Tiongkok di Zimbabwe semakin dominan, yaitu semakin dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di Zimbabwe. Hal ini dikarenakan Tiongkok dapat menuntut negara yang menggunakan mata uang RMB untuk menerapkan kebijakan tertentu terkait penggunaan mata uang Tiongkok. Kondisi ini tentu menguntungkan Tiongkok baik secara ekonomi ataupun politik dan memudahkan Tiongkok untuk melindungi hubungan serta akses dalam negara tersebut. Negara pengguna RMB juga secara tidak langsung akan turut menjaga stabilitas RMB sebagai salah satu kepentingan negaranya. Keadaan ini membuktikan bahwa internasionalisasi mata uang merupakan simbol *tangible* dari kedaulatan, sebagaimana Tiongkok dapat dengan mudah meningkatkan posisinya dan bahkan mempengaruhi kebijakan internal negara pengguna RMB (Chey, 2003: 353).

Kesimpulan

Kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan Zimbabwe merupakan salah satu upaya Tiongkok untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pencapaian terhadap kepentingan nasional tentu bukanlah hal yang mudah dan memerlukan strategi yang tepat, terlebih jika dilakukan atau berkaitan dengan negara seperti Zimbabwe. Zimbabwe sebagai negara dengan perekonomian dan pemerintahan yang buruk menjadi tantangan tersendiri bagi Tiongkok untuk melakukan kerjasama ekonomi. Tiongkok kemudian

memanfaatkan sanksi dan embargo yang dikeluarkan oleh negara-negara Barat dan organisasi internasional kepada Zimbabwe sebagai sebuah peluang besar untuk mendekati pemerintahan Zimbabwe guna mendapatkan “kondisi baik” di tengah buruknya lingkungan Zimbabwe. Tiongkok melihat Zimbabwe memiliki sumber daya yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti tembakau, kapas, dan berbagai hasil tambang seperti berlian, tembaga, platinum, nikel, dan sebagainya.

Penerapan strategi Tiongkok dilakukan dengan memetakan kondisi Zimbabwe terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan dan cara yang tepat untuk mendekati pemerintahan Zimbabwe yang dikelola oleh rezim otoriter Mugabe. Tiongkok kemudian berhasil untuk mendapatkan empati dari pemerintahan Zimbabwe melalui dukungan dan bantuan yang diberikan secara terus-menerus bahkan ketika Zimbabwe sedang dikecam oleh pihak internasional. Meskipun sikap ini membuat Tiongkok mendapatkan teguran dari organisasi internasional karena dianggap membela pelanggaran atas HAM yang ada di Zimbabwe, Tiongkok justru mengabaikan teguran tersebut. Pengabaian tersebut dapat dijelaskan melalui pandangan realisme terkait kondisi anarki, yaitu kedaulatan negara di atas organisasi internasional sehingga Tiongkok merasa tidak berkewajiban untuk mentaatinya. Dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Zimbabwe pun demikian dikatakan oleh Tiongkok sebagai bentuk non-intervensi dan menghargai kedaulatan Zimbabwe.

Selain prinsip non-intervensi, bantuan yang diberikan tanpa adanya syarat tersebut dinilai oleh pihak internasional akan disalahgunakan oleh pemerintah Zimbabwe yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Namun menurut perspektif realis yang dibawa oleh Tiongkok, asumsi dan teguran yang diberikan oleh pihak internasional tidak menjadi alasan untuk menghentikan bantuan kepada Zimbabwe. Terlebih

Tiongkok menggunakan bantuan tersebut sebagai alat untuk mendapatkan pasokan bahan mentah dari Zimbabwe dan juga kemudahan akses untuk mengekspor barang jadi. Bantuan luar negeri Tiongkok juga sering diberikan dalam bentuk proyek atas produksi baru Tiongkok dengan mempekerjakan tenaga kerja atau menggunakan material dari Tiongkok. Hal ini dinilai lebih mudah untuk bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan sama di Zimbabwe.

Melalui strategi yang diterapkan atas prinsip non-intervensi dan bantuan luar negeri, Tiongkok berhasil menjadikan kepentingannya di Zimbabwe tetap terpenuhi. Penggunaan strategi tersebut bahkan menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki posisi yang lebih dominan dalam hubungan bilateralnya dengan Zimbabwe di bidang ekonomi, meskipun Tiongkok berperan sebagai “tamu” di Zimbabwe. Tiongkok menunjukkan bahwa kedekatan yang dibangun dengan pemerintah Zimbabwe berhasil memberikan peluang yang besar untuk menuntut adanya kebijakan atau kemudahan tertentu atas kerjasama ekspor-impor Tiongkok dengan Zimbabwe. Hal ini menjadi mungkin dengan melihat kondisi pemerintahan Zimbabwe menjadikan Tiongkok sebagai *main financial backing*. Penolakan atas tuntutan yang diberikan oleh Tiongkok akan berimbas pada minimnya bantuan yang diterima oleh Zimbabwe sehingga akan berpengaruh pada penurunan performa dalam pengembangan serta lebih lanjut akan berdampak pada rezim Mugabe sendiri.

Pada akhir tahun 2015, Zimbabwe bahkan memutuskan untuk menggunakan RMB sebagai salah satu mata uang resmi di negaranya. Hal ini dilakukan setelah Xi Jinping mencabut hutang jatuh tempo Zimbabwe yang mencapai US\$ 40 juta. Digunakannya RMB dalam perekonomian Zimbabwe akan membuka peluang bagi Tiongkok untuk campur tangan terkait kebijakan penggunaan RMB di Zimbabwe. Kondisi

ini menambah bukti bahwa dengan memberikan banyak bantuan, baik berupa kerjasama ataupun hutang Tiongkok berhasil mempengaruhi perekonomian Zimbabwe hingga membuat pemerintah Zimbabwe

memutuskan untuk menggunakan RMB. Kondisi ini tentu semakin menguatkan posisi Tiongkok di Zimbabwe dan menguntungkan serta memudahkan jalannya kerjasama ekspor-impor antara Tiongkok dengan Zimbabwe.

Daftar Pustaka

- [1] Aliya, Angga, 2015. *Zimbabwe Terapkan Yuan Jadi Mata Uang Sehari-hari*.
<http://finance.detik.com/read/2015/12/23/134728/5/zimbabwe-terapkan-yuan-jadi-mata-uang-sehari-hari> (diakses pada 20 Oktober 2016).
- [2] Anon, 2009. "MMCZ, Chinese Nickel Company Sign MOU". *Zimbabwe*.
<http://www.chinamining.org/Investment/2009/08/10/1249886895d27818.html> (diakses pada 19 Juli 2017).
- [3] Anon, 2011. *China's Foreign Aid*. Information Office of the State Council People's Republic of China.
- [4] Anonim, 2016. "Embassy of the United States: Harare, Zimbabwe". U.S. Sanction Policy: Facts and Myths. 14 Maret 2016.
https://harare.usembassy.gov/sanctions_facts_myths.html (diakses pada 12 Oktober 2016).
- [5] Chey, Hyoung-kyu, 2013. "Can the Renminbi Rise as a Global Currency? The Political Economy of Currency Internationalization". *Asian Survey*, Vol. 53, No. 2. University of California Press. 348-368. Dalam
<http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2013.53.2.348> (diakses pada 18 Maret 2017).
- [6] Chow, Gregory C., 2004. "Economic Reform and Growth in China". *Annals of Economic And Finance* 5. Peking University Press. 127-152.
- [7] Chun, Zhang, 2014. "China-Zimbabwe Relations: A Model of China-Africa Relations?". *Occasional Paper* 205. South African Institute of International Affairs (SAIIA): Global Power and Africa Programme, 2014.
- [8] Condon, Madison, 2012. "China in Africa: What the Policy of Nonintervention Adds to the Western Development Dilemma". *PRAXIS – The Fletcher Journal of Human Security*, Volume XVI. 5-24.
- [9] Davies, M., Hannah Edinger, N. Tay, & S. Naidu, 2008. *How China Delivers Development Assistance to Africa*. Centre for Chinese Studies, University of Stellenbosch.
- [10] Edinger, Hannah dan Christopher Burke, 2008. *AERC Scoping Studies on China-Africa Relations: A Research Report on Zimbabwe*. Center for Chinese Studies. University of Stellenbosch.
- [11] International Monetary Fund, 2016. *IMF News Article: IMF Adds Chinese Renminbi to Special Drawing Rights Basket*, 30 September 2016. Dalam
<http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/29/AM16-NA093016IMF-Adds-Chinese-Renminbi-to-Special-Drawing-Rights-Basket> (diakses pada 17 Oktober 2016).
- [12] Jackson, Robert dan Georg, Sorensen, 1999. *Introduction to International Relation*. Oxford University Press.
- [13] Jacob, Nancy dan Stultz, Newell, 2009. "Crisis in Zimbabwe". *Choices for the 21st Century Education Program*. 1-5.
- [14] Lampton, David M., 2014. "China's Foreign Policy, Great Decisions, Eat Decisions". *Foreign Policy Association*. 73-84. Dalam
<http://www.jstor.org/stable/43681117> (diakses pada 18 Maret 2017).
- [15] Lengauer, Sara, 2011. "China's Foreign Aid Policy: Motive and Method". *Culture Mandala: Bulletin of the Center for East-West Cultural & Economic Studies*, Vol. 9 Issue 2. 35-81.
- [16] Mapaire, Clever, 2014. *Chinese Investment in Zimbabwe and Namibia: A Comparative Legal Analysis*. Stellenbosch University: Center for Chinese Studies.
- [17] Mashigaide, Andrew Michael, 2016. "China's Changing Foreign Policy Towards Africa: A Critical Assessment of the Possible Implications, the Case of Zimbabwe". Master Thesis, University of Witwatersrand.
- [18] Meidan, Michal, 2006. "China's Africa Policy: Business Now, Politic Later". *Asian Perspective*, Vol. 30, No. 4, Special Issue on "Rising China's Foreign Relation". Lynne Rienner Publishers. 69-93. Dalam
<http://www.jstor.org/stable/42704565> (diakses pada 18 April 2017).
- [19] Morrison, Wayne M., 2015. *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implication for the United States*. Congressional Research Service.
- [20] Mukwereza, Langton, t.t. "Chinese and Brazilian Cooperation with African Agriculture: The Case of Zimbabwe". *CBA Working Paper 048*. Dalam
www.future-agricultures.org (diakses pada 20 Maret 2017).
- [21] Munangagwa, Chidochashe L., t.t. "The Economic Decline of Zimbabwe". *Gettysburg Economic Review*, Volume 3. 100-141. Dalam

- <http://cupola.gettysburg.edu/ger/vol3/iss1/9> (diakses pada 18 Maret 2017).
- [22] Nowak, Wioletta, 2015. "China's Development Aid Strategies". *Chinese Business Review*, Vol. 14. David Publisher. 201-208.
- [23] Palmer, Glenn, Scott B. Wohlander, dan T. Clifton Morgan, 2009. "Give or Take: Foreign Aid and Foreign Policy Substitutability". *Journal of Peace Research*, Vol. 39 No. 1. Sage Publication. 5-26.
- [24] Papadavid, Phyliss, 2016. *China's Balancing Act: Why the Internationalisation of the Renminbi Matters for the Global Economy*. Overseas Development Institute Report. Ren, Mu, 2014. "China's Non-intervention Policy in UNSC Sanctions in the 21st Century: The Case of Libya, North Korea, and Zimbabwe". *Ritsumeikan International Affaris*, Vol. 12. Institute of International Relations and Area Studies, Ritsumeikan University. 101-134.
- [25] Shinn, David, 2013. "China in Africa: Savior or Self-interest?". *Great Decisions, Eat Decision*. Foreign Policy Association. 85-96. Dalam <http://www.jstor.org/stable/43682516> (diakses pada 18 Maret 2017).
- [26] Southern African-German Chamber of Commerce and Industry, 2016. *Zimbabwe*. Dalam http://suedafrika.ahk.de/fileadmin/ahk_suedafrika/Annual_Country_Reports/2015_Zimbabwe_Annual_Country_Reports.pdf (diakses pada 10 Oktober 2016).
- [27] Thompson, Reagan, 2012. Assessing the Chinese Influence in Ghana, Angola, and Zimbabwe: The Impact of Politics, Partners, and Petro. Stanford University: Center for International Security and Cooperation (CISAC).
- [28] Tombindo, Felix dan Tukic, Nusa, 2016. "Economic Repercussions of the Look East Policy in Zimbabwe." *Policy Briefing*. Center for Chinese Studies.
- [29] Yang, Dali L., 2003. "China in 2002: Leadership Transition and the Political Economy Governance ." *Asian Survey*, 43:1. 25-40.
- [30] Zimstat, 2013. *Foreign Private Capital Survey Report 2013*. www.zimstat.co.zw (diakses pada 10 Mei 2017).
- [31] Zimstat, 2015. *Zimbabwe Annual Country Reports 2015*. www.zimstat.co.zw (diakses pada 18 Maret 2017).